

Malam Tirakatan dan Sejarah Kampung

16 Agustus 2019, Jalandamai.org.

<https://jalandamai.org/malam-tirakatan-dan-sejarah-kampung.html>

Heri Priyatmoko

Dosen Prodi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma



Sekeping tradisi yang terus berlangsung sejak pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia ialah malam tirkatan. Saban kampung “wajib” mengelat “ritual” nasional tersebut untuk meronce sekaligus merenungkan kisah perjuangan kusuma bangsa dan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum acara potong tumpeng, biasanya diisi dengan kilas balik sejarah. Beruntung bila di kampung masih dijumpai tentara veteran atau saksi hidup era perang kemerdekaan. Mereka bisa membagi kisah pengalaman hidupnya.

Tampaknya perlu juga “dedongengan” dalam malam tirakatan ditambah materi sejarah kampung agar generasi muda peduli terhadap tempat yang ditinggalinya. Terus terang, kini sebagian besar remaja kehilangan identitas kampung. Mereka tak ambil peduli, hanya memandang kampung sebagai ruang hunian tanpa makna. Kampung dipandang nir-sejarah.

Padahal, kampung menurut Bakti Setiawan dalam pidato pengukuhan guru besar di UGM (2010) merupakan satu organisme yang hidup, tumbuh, serta berkembang. Kekhasan kampung justru terletak pada pola-pola fisik yang beragam, organik, seringkali *surprizing*, di luar kadar kreatifitas arsitek yang jenius sekalipun. Saban kampung adalah unik, sebab tiap kampung merepresentasikan kekhasan sejarah, kemampuan, usaha, perjuangan, dan bahkan jiwa merdeka warganya. Kalau ada seribu kampung di satu kota, dapatlah dipastikan akan ada seribu ragam wajah kampung dan jiwa yang berbeda. Demikian pula dalam teori psikologi, faktor lingkungan kampung turut membentuk kepribadian seseorang. Bakat dapat berkembang secara wajar manakala memperoleh rangsangan dari luar (lingkungan sekitarnya).

Baiklah, saya ambilkan contoh perkampungan penting di Solo yang pernah ditinggali tokoh nasional kontemporer. Sebut saja Presiden Jokowi. Semasa kecil, ia hidup di Kampung Cinderejo yang masuk area kekuasaan Praja Mangkunegaran. Merujuk tradisi lisan, muasal nama Cinderejo bertemali dengan kisah historis ditemukannya kain sutra halus (*cindhe*) di masa lampau. Pemilik *cindhe* notabene keluarga aristokrat bersabda, daerah tersebut kelak akan makmur (*reja*). Fenomena lumrah di Solo tempo dulu, orang luar *bebara* (merantau) mengadu nasib ke *kutharaja* (kota kerajaan) menempati pinggiran kota sebagaimana orangtua Jokowi. Berkubang dalam kemiskinan dan memperoleh rejeki sehari ludes dimakan sehari merupakan pandangan biasa.

Bantaran Kali Pepe menjadi tempat bermain bersama teman sebayanya. Bukan di kolam berair bening seperti Manahan dan Tirtomoyo untuk pembinaan atlet renang dengan syarat mengeluarkan kocek ketika berniat *jeguran*. Sebab itulah, kepala negara bertubuh kerempeng ini terasa dekat dengan kehidupan wong cilik dan kesederhanaan. Bahkan, tak kaget atawa kikuk dengan strategi politik *blusukan* yang dipoles tim kampanye sebagai program unggulan yang tak dipunyai sang rival.

Kuwalik grembyang (jomplang sekali) dengan Menko Polhukam, Wiranto. Kepribadian serta darah militer tampak merembes di tubuhnya dipengaruhi unsur ekologi budaya Kampung Punggawan. Tempat Wiranto lahir dan diasuh dalam kebudayaan Jawa ini berada di sisi barat Pura Mangkunegaran. Punggawan selama periode kerajaan hingga awal kemerdekaan dihuni abdi dalem prajurit Mangkunegaran. Fakta ini diperkuat dengan toponim “punggawa”, yakni sebutan barisan pengikut RM Said (Gusti Mangkunegara I) sewaktu mengobarkan pemberontakan selama dua windu.

Babad Panambangan (1918) merekam jumlah punggawa semula ada 18 orang. Selang satu dasawarsa, membengkak menjadi 40 orang dengan sebutan *punggawa baku*. Nama depan mereka diberi embel-embel “jaya” oleh penguasa. Semisal, Jayawikrama, Jayautama, Jayasentana, dan lainnya. Dalam riset saya, dan sempat bercakap dengan Wiranto beberapa tahun silam di sebuah acara bedah buku, diakui bahwa pamannya yang jarak rumahnya sepelemparan batu adalah seorang tentara legiun. Rata-rata tentara kebanggaan Gusti Mangkunegara yang disegani dan terkenal disiplin itu berdiam dan beranak-pinak di Punggawan, serta berhasil meneruskan tradisi kemiliteran.

Kemudian, tokoh reformasi Amien Rais. Ia kali pertama melihat terangnya jagad dan dibesarkan, yakni di lingkungan Kampung Kepatihan. Atlas sejarah dibentangkan, disebut Kepatihan karena tempat tersebut silam dipakai kantor dan rumah dinas patih Keraton Kasunanan. Kantor Kepatihan kini digunakan untuk ruang sekolah Konservatori Karawitan (embrio SMKI 8 Surakarta).

Dalam kacamata sejarah pemerintahan tradisional, posisi patih bisa dipandang licik serta oportunistis. Dua kakinya berpijak pada kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dan Sinuhun Paku Buwana. Alhasil, patih menerima dua gaji saban bulannya. Patih difungsikan petinggi kolonial guna mengawasi dan melaporkan dinamika politik istana Kasunanan. Ketakutan Belanda tak berlebihan mengingat mereka hanyalah pendatang dan sedikit bala tentaranya. Beberapa tahun setelah Amien Rais dilahirkan (1944), nasib pahit menimba kompleks Kepatihan sewaktu revolusi sosial bergejolak di *tlatah* Surakarta 1948. Masyarakat Kepatihan geger lantaran kantor Kepatihan dibakar kaum penentang feodalisme dan kolonialisme.

Dari uraian historis di muka, tergambar bahwa kampung bukan sekadar penggenap keberadaan kota. Bukan sebatas wadah atas tumpukan kisah masa lalu. Kampung merupakan ekosistem budaya yang sedikit banyak memengaruhi jalan hidup dan karakter warganya. Para tokoh di atas tadi, misalnya, kala bocah tentu punya memori indah segenap aspek yang hidup di kampung. Misalnya, gotong-royong, toleransi, menjunjung keragaman, dan kesetiakawanan.

Dengan mendongengkan riwayat kampung di malam tirakatan, masyarakat dijembarakan bahwa Indonesia terdiri dari kampung-kampung, bukan kota-kota. Pantaslah kita menjaga kerukunan di tingkat kampung bermodal cerita sejarah. Memori kolektif tentang kampung merupakan modal berharga untuk menangkal benturan akibat politik identitas dan perbedaan ideologi di tingkat nasional.